

Membidik Mineral RI, AS Membebaskan Tarif Sawit Indonesia

Transisi energi global kian membentuk ulang pola perdagangan internasional, termasuk relasi dagang Indonesia–Amerika Serikat yang mempertemukan kepentingan pengamanan mineral kritis AS dengan akses ekspor sawit Indonesia. Pengecualian tarif bagi sawit mencerminkan titik temu kepentingan tersebut, di tengah meningkatnya permintaan mineral untuk energi bersih dan peran sawit dalam strategi biodiesel nasional. Namun, di balik peluang ini tersimpan pertanyaan penting: apakah diplomasi dagang berbasis kepentingan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, atau justru menyisakan risiko baru bagi agenda hilirisasi dan keberlanjutan?

**Selengkapnya di halaman 2*

Sawit di Tengah Ketidakpastian Global: Membaca Arah Ekonomi Dunia dan Dampaknya bagi Indonesia

Ketidakpastian global yang dipicu oleh proteksionisme, konflik geopolitik, dan pengetatan kebijakan perdagangan kian meningkatkan volatilitas ekonomi dunia, dengan dampak langsung pada arus perdagangan, logistik, dan harga komoditas strategis seperti minyak sawit. Di tengah perlambatan pertumbuhan global dan pergeseran pasar akibat standar keberlanjutan yang makin ketat, sawit Indonesia tetap menjadi penopang devisa, namun menghadapi keterbatasan ruang ekspansi. Dalam konteks ini, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama daya saing, melalui peremajaan kebun, pengembangan varietas unggul, mekanisasi, serta pengelolaan berbasis data—sebuah agenda strategis yang menentukan arah industri sawit nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

**Selengkapnya di halaman 6*

Menuju Sawit 2045: Jalan Transformasi dari Komoditas ke Bioindustri Strategis

Menjelang Indonesia Emas 2045, industri kelapa sawit berada di persimpangan antara bertahan sebagai komoditas primer atau bertransformasi menjadi bioindustri strategis. Tekanan global terkait krisis iklim, standar keberlanjutan, dan kebijakan perdagangan hijau mendorong sawit untuk bergerak melampaui ekspor bahan mentah menuju hilirisasi berbasis bioekonomi, energi terbarukan, dan produk kimia bernilai tinggi. Dengan keunggulan struktural pada pasokan biomassa, potensi pengembangan biosurfaktan, serta dukungan data dan ketertelusuran yang kredibel, sawit berpeluang menjadi bagian dari solusi industri rendah karbon global. Namun, tanpa roadmap jangka panjang, penguasaan teknologi, dan pembiayaan hijau yang memadai, transformasi tersebut berisiko tinggal wacana di tengah laju perubahan global yang semakin cepat.

**Selengkapnya di halaman 8*



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Industri sawit Indonesia kian berada dalam pusaran ketidakpastian global, mulai dari dinamika geopolitik, pengetatan kebijakan perdagangan, hingga percepatan transisi energi. Di tengah tekanan tersebut, sawit tetap memegang peran strategis sebagai penopang devisa, ketahanan energi, dan ekonomi perdesaan. Sawit menghadapi tuntutan peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan hilirisasi bernilai tambah. Selamat membaca IPOSS Insights Edisi Keempat Belas!

Membidik Mineral RI, AS Membebaskan Tarif Sawit Indonesia

Transisi energi global tidak hanya mendorong perubahan teknologi, tetapi juga menggeser cara negara-negara bernegosiasi dalam perdagangan internasional. Di balik dorongan menuju energi bersih, muncul praktik pertukaran kepentingan dagang, di mana akses pasar komoditas tertentu beririsan dengan kepentingan pengamanan rantai pasok sumber daya strategis. Dinamika inilah yang membingkai hubungan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk terbukanya kembali ruang bagi kelapa sawit Indonesia di pasar AS.

Amerika Serikat saat ini berada dalam fase agresif mengamankan pasokan mineral kritis—termasuk tanah jarang dan bahan baku baterai—yang menjadi fondasi industri energi bersih, kendaraan listrik, dan teknologi pertahanan. Data United States Geological Survey menunjukkan bahwa sebagian besar produksi dan kapasitas pemurnian unsur tanah jarang dunia masih terkonsentrasi di Tiongkok. Ketergantungan ini dipandang sebagai risiko strategis, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi global.

Tekanan tersebut diperkuat oleh proyeksi *International Energy Agency* yang menyebutkan bahwa permintaan global terhadap mineral kritis untuk teknologi energi bersih berpotensi meningkat hingga empat kali lipat pada 2040. Bagi Washington, pengamanan rantai pasok mineral tidak lagi semata isu ekonomi, melainkan bagian dari strategi ketahanan nasional. Kebijakan seperti *Inflation Reduction Act* (IRA) dirancang bukan hanya untuk mendorong dekarbonisasi, tetapi juga untuk membentuk ulang pola perdagangan dan memperluas jaringan mitra pasokan strategis.

Dalam konteks inilah posisi Indonesia menjadi relevan. Indonesia memiliki cadangan mineral penting—terutama nikel—yang dibutuhkan dalam ekosistem industri energi bersih global. Padasaat yang sama, Indonesia berkepentingan menjaga akses pasar bagi komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit. Kesepakatan perdagangan terbaru yang memberikan pengecualian tarif resiprokal bagi sawit Indonesia ke Amerika Serikat mencerminkan adanya titik temu kepentingan tersebut.

Bagi Indonesia, pembebasan tarif sawit ke AS dirasa ini penting untuk menjaga daya saing ekspor sektor perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya secara konsisten menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar nasional. Meski Amerika Serikat bukan pasar utama sawit Indonesia, akses

yang lebih longgar tetap strategis di tengah meningkatnya tekanan regulasi dan standar keberlanjutan global.

Namun, sawit dalam lanskap ini tidak berdiri sendiri. Dalam kerangka transisi energi domestik, sawit berperan sebagai bahan baku utama biodiesel. Indonesia saat ini telah melampaui fase mandatori B35 dan tengah mengakhiri fase B40, dengan B50 ditetapkan sebagai target lanjutan dalam peta jalan energi nasional. Kebijakan ini menempatkan sawit sebagai bagian dari strategi pengurangan impor energi fosil dan penguatan ketahanan energi, meski tetap memunculkan perdebatan mengenai dampak lingkungan dan tata kelola lahan.

Di sisi lain, irisan perdagangan sawit dan mineral kritis membawa tantangan jangka panjang. Sejumlah pengamat kebijakan mengingatkan bahwa kerja sama dagang berbasis barter kepentingan harus dikawal secara ketat agar tidak melemahkan agenda hilirisasi mineral. Tanpa pengaturan yang jelas, Indonesia berisiko kembali terjebak sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai nilai global, sementara nilai tambah industri justru dinikmati pihak lain.

Kelompok lingkungan juga menyoroti potensi tekanan ekologis ganda, baik dari ekspansi industri mineral maupun keberlanjutan sawit. Mereka menekankan bahwa transisi energi tidak otomatis ramah lingkungan jika tidak disertai standar lingkungan yang kuat, transparansi kebijakan, dan pengawasan yang konsisten.

Ke depan, tantangan utama pemerintah Indonesia adalah menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dari diplomasi dagang dengan kepentingan jangka panjang kedaulatan sumber daya alam. Dalam lanskap perdagangan global yang semakin ditentukan oleh energi bersih, sawit dan mineral kritis kini terhubung dalam satu ekosistem kebijakan. Cara Indonesia mengelola barter kepentingan ini akan menentukan posisinya dalam rantai nilai global di masa depan. Kita tunggu bagaimana detail perjanjian keduanya yang akan dteken di Washington akhir bulan pertama 2025 (JH)



EUDR Ditunda: Jeda Waktu di Tengah Standar Ketat



Penundaan pelaksanaan EU *Deforestation Regulation* (EUDR) akhirnya mendapatkan kepastian hukum pada penghujung 2025. Setelah melalui pembahasan panjang, Uni Eropa secara resmi memfinalisasi revisi jadwal implementasi EUDR melalui amandemen yang dipublikasikan pada 23 Desember 2025 dalam *Official Journal of the European Union*. Keputusan ini menggeser tenggat kepatuhan menjadi 30 Desember 2026 bagi operator besar dan pedagang, serta 30 Juni 2027 bagi usaha mikro dan kecil. Penyesuaian ini menandai fase transisi baru, tanpa mengubah arah kebijakan keberlanjutan Uni Eropa secara substantif.

Sejak awal, EUDR dirancang sebagai instrumen utama Uni Eropa untuk menekan deforestasi global yang dikaitkan dengan konsumsi di pasar Eropa. Regulasi ini mewajibkan komoditas tertentu—seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, kayu, dan turunannya—memenuhi tiga pilar utama: ketertelusuran hingga titik produksi, pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), serta pembuktian bahwa produk tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah batas waktu yang ditetapkan. Dalam berbagai dokumen kebijakan, Komisi Eropa menempatkan EUDR sebagai bagian dari *European Green Deal* dan strategi perdagangan berkelanjutan Uni Eropa.

Alasan di balik penundaan implementasi bersifat strategis dan teknokratis. Evaluasi internal Uni Eropa menunjukkan masih adanya kesenjangan kesiapan, baik dari sisi infrastruktur teknologi, mekanisme verifikasi, maupun kapasitas pelaku usaha kecil di negara produsen. Dewan Uni Eropa secara terbuka menyebut risiko gangguan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan utama penyesuaian jadwal. Meski demikian, otoritas Uni Eropa menegaskan bahwa penundaan ini tidak dimaksudkan untuk

melonggarkan standar lingkungan.

Substansi EUDR tetap tidak berubah. Kewajiban pembuktian bebas deforestasi, transparansi rantai pasok, dan akuntabilitas pelaku usaha tetap berlaku penuh. Dengan kata lain, penyesuaian jadwal hanya memberikan waktu tambahan untuk kesiapan administratif dan teknis, bukan penurunan tingkat kepatuhan yang dituntut.

Bagi korporasi, jeda waktu ini menjadi fase krusial untuk memperkuat sistem internal. Tantangan utama terletak pada ketersediaan dan kualitas data rantai pasok, mulai dari geolokasi kebun, identitas pemasok, hingga dokumentasi alur material. Sejumlah laporan lembaga independen menunjukkan bahwa kesiapan awal terhadap EUDR dapat menjadi faktor pembeda dalam mempertahankan akses pasar Uni Eropa.

Dampak yang lebih kompleks dirasakan oleh petani kecil dan UMKM. Keterbatasan administrasi lahan, minimnya pencatatan produksi, serta lemahnya kelembagaan menjadi tantangan struktural. Tanpa pendampingan dan kolaborasi multipihak—antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendukung—risiko eksklusi petani dari rantai pasok global menjadi nyata, sebagaimana dicatat dalam sejumlah kajian organisasi pembangunan internasional.

Bagi Indonesia, EUDR mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap perdagangan global. Standar keberlanjutan kini berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang memengaruhi daya saing dan akses pasar. Penundaan implementasi memberikan ruang persiapan, namun juga mengirim sinyal tegas bahwa transparansi dan keberlanjutan rantai pasok akan menjadi norma baru perdagangan internasional. (JH)

Napak Tilas Lahan Sawit Indonesia



Sumber: Natgeo

Akhir-akhir ini makin banyak yang bersuara satir terhadap pohon sawit. Bahkan menjadikannya kambing hitam dalam berbagai peristiwa banjir dan longsor. Sayangnya, hanya sedikit yang mendalami perjalanan sawit dan cenderung menari diatas gendang orang lain.

Tidak ada satupun suku di Jawa, Sumatra, Kalimantan hingga Papua yang ingin mempromosikan dan menumbuhkan sawit sebagai kebun di Indonesia. Kakek nenek mereka tidak tahu menahu bagaimana empat bibit kelapa sawit pada tahun 1848 dibawa oleh Belanda dari Afrika Barat untuk ditanam di Kebun Raya, Bogor, Jawa Barat. Mungkin para penjajahnya, waktu itu, melakukannya hanya untuk riset, atau mungkin percobaan tanpa motif tertentu. Yang jelas, bangsa asli Indonesia tidak punya sangkut paut atas kedatangan bibit yang di kemudian hari menjadi kontroversial tersebut.

Konsekuensi dari penanaman biji-biji itu pada ketinggian yang tepat, dengan sinar matahari dan hujan yang cukup, maka dalam waktu kisaran 5 tahun mulai menghasilkan buah. Karena belum memahami secara komprehensif tentang kehebatan dan manfaat sawit, maka buah hasil dari Bogor itu pun dibagi-bagikan secara percuma ke Sumatra untuk dijadikan tanaman hias di pinggir jalan. Daunnya yang tebal dan melambai-lambai sering menjadi tempat berteduh yang nyaman bagi pejalan kaki dan masyarakat yang bersepeda.

Barulah perubahan besar terjadi ketika pemerintah kolonial menyadari potensi ekonominya. Mereka terkaget-kaget ternyata setelah dilakukan penelitian begitu mendalam, banyak manfaat bisa dipetik dari buah kelapa sawit. Tak ayal, pada 1911, perkebunan komersial pertama didirikan di Tanah Deli, Sumatra Utara. Dari titik inilah era industri sawit dimulai.

Jadi, bukan masyarakat Indonesia yang memulai, membawa dan mengeksploitasi sejak dini. Rakyat Indonesia yang saat itu menjadi jajahan Belanda, justru antara lain sedang terbebani dengan kebijakan “tanam paksa” atau *cultuurstelsel* (1830 – 1870). Masyarakat petani sibuk mengerjakan penanaman aneka tanaman yang lagi dibutuhkan di Eropa, secara terpaksa dan bukan suka rela. Tanam Paksa yang konsepnya

diperkenalkan oleh Johannes van den Bosch itu akhirnya dihentikan dan tidak menyentuh sistem persawitan sebagai respon atas terbitnya buku “Max Havelaar” buah karya Multatuli yang menyoroti kekejaman selama kebijakan dimaksud dilaksanakan.

Melihat hasil penelitian menggembirakan atas sawit yang dilakukan di akhir masa kolonialisme, Pemerintah Belanda memutuskan terus memperluas perkebunannya. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda mendirikan pusat-pusat riset sawit dimulai dari kota Medan. Disana, Belanda mendidikan Perpustakaan Khusus Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Perpustakaan PPKS) yang merupakan pusat kelapa sawit tertua di zaman Belanda.

Seiring dengan perkembangan zaman, termasuk diraihnya kemerdekaan Indonesia, maka anak bangsa ini mulai mengais-ngais warisan penjajah antara lain berupa tanaman kelapa sawit yang sudah sedemikian luas. Waktu itu, sudah mulai diketahui bahwa minyak nabati dari sawit jauh lebih efisien daripada minyak nabati yang berasal dari bunga matahari, *rapeseed* dan kacang-kacangan.

Lalu di zaman setelah kemerdekaan, perkembangan sawit semakin cepat melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada 1970-1980-an. Pemerintah mendorong sawit sebagai komoditas pembangunan pedesaan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan devisa. Program ini berlanjut lewat Instruksi Presiden Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang terkoordinasi dengan program transmigrasi. Sumatra menjadi pusat ekspansi, disusul Kalimantan pada 1990-2000-an. Kemudian pada 2006, Indonesia resmi melampaui Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Hal-hal semacam inilah yang sebaiknya menjadi renungan bersama sebelum menunjuk sawit menjadi biang keladi mulai dari masalah kesehatan, lingkungan hingga kerusakan alam. Apalagi, sawit telah terbukti beberapa kali menyelamatkan ekonomi nasional seperti di saat pandemi dan krisis moneter. Prof Budi hanya mengisyaratkan agar kita semua menjadi bangsa yang cermat dan tidak mudah menari diatas gendang orang lain. (MAS)

Tata Ruang *Fit for Purpose*: Fondasi Kepastian Hukum dan Keberlanjutan, Termasuk Bagi Industri Sawit yang Berkelanjutan

Kepastian hukum atas lahan perkebunan kelapa sawit merupakan fondasi strategis bagi Upaya membangun industri sawit yang keberlanjutan, baik secara lingkungan, stabilitas ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja serta berdampak pada iklim investasi jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, isu ini tidak dapat dilepaskan dari peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen utama pengaturan pemanfaatan ruang. RTRW bukan sekadar dokumen normatif, melainkan kerangka kebijakan yang menentukan apakah pengelolaan lahan sawit dapat berjalan secara legal, berkeadilan, dan berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Konsep *fit for purposes* sebelumnya dikenal dalam konteks administrasi pertanahan, yang maknanya sistem administrasi pertanahan atau perencanaan ruang dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan konteks setempat, bukan sekadar mengikuti standar teknis yang kompleks atau tidak relevan. Pendekatan ini terbuka, fleksibel, partisipatif, dan bisa ditingkatkan seiring waktu sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata wilayah. Jadi RTRW dengan pendekatan *fit for purpose* berarti tata ruang yang dirancang sesuai dengan tujuan nyata pembangunan dan kondisi eksisting wilayah, serta mampu mengakomodir kebutuhan Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di atasnya dengan tetap menjaga daya dukung agar berkelanjutan. Indonesia saat ini didominasi oleh lanskap *brownfield*, yaitu kawasan yang telah lama dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk perkebunan, permukiman, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pendekatan tata ruang tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada asumsi *greenfield* yang menganggap ruang masih kosong dan bebas dari jejak sosial-ekonomi. RTRW yang mengabaikan realitas *brownfield* berisiko menciptakan ketidaksesuaian antara rencana dan praktik di lapangan dan menyia-nyiaakan sumber daya terbatas yang telah digunakan di atasnya.

RTRW dengan konsep *fit for purpose* akan mampu mengakomodir kebutuhan Masyarakat dalam jangka Panjang, dan menghindari ketidaksinkronan antara penetapan kawasan, perizinan usaha, dan status penguasaan lahan, baik Hak Guna Usaha (HGU) maupun hak milik, mengurangi potensi tumpang tindih klaim dan konflik agraria. Sehingga pada gilirannya menguatkan kepastian usaha, mendorong investasi, serta memudahkan penegakan kewajiban lingkungan. Pada gilirannya, RTRW akan menjadi realistis dan adaptif untuk dapat menjadi dasar legal yang kuat bagi penataan ulang, penguatan legalitas, serta peningkatan kualitas pengelolaan komoditas Perkebunan, termasuk sawit dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

RTRW yang *fit for purpose* harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan secara seimbang. Keseimbangan berbagai aspek seperti:

1. Kepentingan lingkungan, dengan memastikan perlindungan kawasan lindung, daerah resapan air, serta area bernilai konservasi tinggi.
2. Kepentingan ekonomi, dengan memberikan ruang yang jelas dan legal bagi aktivitas perkebunan yang produktif, aktivitas produktif lainnya dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
3. Kepentingan sosial, dengan mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal yang telah lama hidup dan beraktivitas di wilayah tersebut, dengan segala “kekurangannya” jika merujuk kerangka administrasi pertanahan modern.

Integrasi ini pada gilirannya akan dapat mendorong berbagai capaian target-target nasional seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan, ketahanan energi melalui energi terbarukan serta *net zero* emission, sebaliknya akan terjadi apabila integrasi tidak berhasil dilakukan.

Dalam kerangka keberlanjutan, RTRW yang *fit for purpose* juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pergeseran dari ekspansi lahan menuju intensifikasi dan optimalisasi *brownfield*. Dengan kepastian peruntukan ruang, pelaku usaha, termasuk perkebunan sawit memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, memperbaiki praktik pengelolaan lingkungan, dan mengurangi tekanan terhadap pembukaan lahan baru. Pendekatan ini sejalan dengan upaya menekan deforestasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendukung komitmen Indonesia terhadap pembangunan rendah karbon.

Pada akhirnya, RTRW dengan konsep *fit for purpose* merupakan kunci untuk menjembatani kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial dalam kebijakan pengaturan dan pemanfaatan ruang. Dengan tata ruang yang sesuai dengan tujuan nyata pembangunan dan kondisi eksisting wilayah, serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di atasnya dengan tetap menjaga daya dukung agar berkelanjutan akan menjadikan semua *stakeholders* bersatu padu untuk menjadikan berbagai komoditas unggulan Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. (HN)

Sawit di Tengah Ketidakpastian Global: Membaca Arah Ekonomi Dunia dan Dampaknya bagi Indonesia

Perekonomian global memasuki fase ketidakpastian tinggi seiring penyesuaian kebijakan perdagangan dan industri di negara-negara besar, yang berdampak pada arus perdagangan, investasi, dan harga komoditas global. Dalam kondisi ini, risiko proteksionisme dan gangguan rantai pasok meningkatkan volatilitas tidak hanya melalui harga, tetapi juga perubahan pola perdagangan, biaya logistik, dan kepastian akses pasar, sehingga komoditas strategis seperti minyak sawit menjadi semakin sensitif terhadap guncangan global.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2026 berada pada kisaran 3,1–3,2%, dengan asumsi normalisasi kondisi keuangan global dan stabilisasi kebijakan perdagangan. Namun, risiko penurunan tetap membayangi terutama jika inflasi global tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Indeks Ketidakpastian Perdagangan Global yang menunjukkan belum meredanya tekanan proteksionisme dan gangguan rantai pasok.

Ketidakpastian global juga diperkuat oleh dinamika geopolitik yang berdampak langsung pada energi dan logistik. Konflik di Timur Tengah, perang Rusia–Ukraina, serta rivalitas Amerika Serikat dan Cina meningkatkan risiko gangguan pasokan, mendorong volatilitas harga, dan memperbesar biaya transportasi, dengan implikasi lanjutan terhadap pasar komoditas, termasuk minyak sawit sebagai bahan baku substitusi energi.

Lanskap perdagangan minyak sawit global semakin selektif seiring pengetatan regulasi keberlanjutan dan ketertelusuran di Uni Eropa serta penguatan kebijakan industri di sejumlah negara maju. Perubahan ini mendorong pergeseran arus perdagangan ke kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Bagi Indonesia, dinamika tersebut berdampak pada arah pengembangan industri sawit dalam jangka menengah–panjang. Sawit tetap berperan sebagai sumber devisa dan penopang neraca perdagangan, namun ruang pertumbuhan berbasis ekspansi areal tidak tersedia. Oleh sebab itu, daya saing industri sawit ke depan semakin ditentukan oleh peningkatan produktivitas perkebunan.

Penguatan Daya Saing dan Produktivitas

Dalam kerangka penguatan daya saing sawit nasional di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya tekanan eksternal yang menuntut strategi intensifikasi tanpa ekspansi areal, sasaran produktivitas perlu diposisikan sebagai acuan teknis jangka menengah untuk menutup kesenjangan produktivitas dan menjaga keberlanjutan industri sawit domestik. Angka produktivitas sekitar 35 ton TBS/ha/tahun dengan *Oil Extraction Rate* (OER) 26%, atau setara ±9,1 ton CPO/ha/tahun, merepresentasikan tingkat capaian yang secara agronomis memungkinkan berdasarkan potensi material tanam unggul dan praktik pengelolaan kebun yang optimal.

Fondasi utama peningkatan produktivitas terletak pada material tanam, mengingat sebagian varietas yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan konsistensi hasil dan ketahanan terhadap penyakit. Karena itu, pengembangan varietas unggul yang produktif, adaptif iklim, efisien hara, tahan penyakit, dan stabil dalam jangka panjang perlu menjadi agenda utama.

Peningkatan produktivitas juga menuntut konsistensi peremajaan pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar dengan proporsi tanaman tua yang signifikan. Perbaikan tata kelola program peremajaan diperlukan melalui penyederhanaan prosedur, penyediaan dana pendamping, kepastian legalitas lahan, penguatan akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas pendampingan teknis.

Disamping itu, mekanisasi dan digitalisasi kebun menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi panen, mendukung pemupukan presisi, serta memperkuat manajemen kebun berbasis data. Pada saat yang sama, riset dan penerapan *Best Management Practices* (BMP) perlu diperkuat, terutama dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemupukan berimbang, dan praktik budidaya berbasis sains guna memastikan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. (DS)



Hilirisasi Sawit: Antara Nilai Tambah dan Realitas Investasi



Hilirisasi industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama strategi industrialisasi Indonesia. Melalui kebijakan ini, sawit tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas primer, tetapi sebagai basis pengembangan industri bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi nasional. Namun, di balik kemajuan yang dicapai, hilirisasi sawit juga menghadirkan pertanyaan: sejauh mana janji nilai tambah tersebut benar-benar terwujud dalam realitas investasi dan kapasitas industri?

Secara struktural, arah hilirisasi sawit Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Ragam produk hilir sawit meningkat tajam dari hanya 54 jenis pada 2010 menjadi 224 jenis produk pada 2024, yang tersebar dalam tiga jalur utama: oleopangan, oleokimia, dan bioenergi. Perubahan ini diikuti pergeseran komposisi ekspor, di mana porsi ekspor CPO menyusut drastis dari rasio 59:41 pada 2010 menjadi hanya 11:89 antara CPO dan produk olahannya pada 2025. Dampaknya, nilai ekspor produk olahan sawit melonjak dari USD 6,5 miliar pada 2010 menjadi USD 21,8 miliar pada 2024.

Dari perspektif nilai tambah, data ini menunjukkan keberhasilan awal hilirisasi. Berdasarkan indeks yang dibuat oleh tim IPOSS, indeks hilirisasi sawit meningkat dari basis 100 pada 2015 menjadi 136,7 pada 2024, mencerminkan pendalaman struktur industri hilir. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan transformasi industri yang mendalam.

Hilirisasi sawit Indonesia masih sangat bertumpu pada produk biodiesel. Kebutuhan biodiesel domestik mencapai hampir 19 juta ton pada 2024, menjadikannya motor utama penyerapan CPO dalam negeri. Menurut Kementerian Investasi dalam Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis 2023-2040, sektor biodiesel diproyeksikan menyerap investasi hingga USD 5,9 miliar, jauh melampaui subsektor hilir lainnya. Industri oleokimia lanjutan dan produk specialty masih menghadapi tantangan teknologi, kebutuhan modal

besar, serta pasar ekspor yang lebih sempit dan spesifik. Akibatnya, kapasitas industri hilir sawit belum sepenuhnya seimbang dengan potensi produksi CPO nasional yang terus meningkat.

Dari sisi ketenagakerjaan, hilirisasi sawit memberikan dampak yang signifikan. Secara keseluruhan, industri sawit dari hulu hingga hilir menyerap sekitar 18 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Pengembangan industri hilir mendorong tumbuhnya aglomerasi industri di luar Jawa yang membuka peluang kerja di sektor manufaktur dan jasa pendukung. Program pengembangan sawit periode 2026-2029 juga berpotensi menyerap lebih dari 800 ribu tenaga kerja dari skema kebun inti dan plasma.

Meski demikian, karakter industri hilir sawit yang cenderung padat modal membatasi efek penggandaan tenaga kerja. Kementerian Investasi memperkirakan tambahan penyerapan tenaga kerja langsung dari investasi hilirisasi periode 2023-2029 hanya sekitar 4.330 orang, angka yang relatif kecil dibanding skala investasi dan ekspektasi kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa hilirisasi sawit lebih berkontribusi pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja daripada ekspansi kuantitas tenaga kerja secara masif.

Pada akhirnya, hilirisasi sawit Indonesia berada di persimpangan antara keberhasilan struktural dan tantangan pendalaman industri. Nilai tambah dan kapasitas industri memang meningkat, tetapi masih terkonsentrasi pada produk menengah dan sangat bergantung pada insentif kebijakan. Tanpa dorongan investasi yang lebih kuat ke produk hilir bernilai tinggi dan inovatif, hilirisasi berisiko berhenti pada tahap industrialisasi parsial. Transformasi sawit sebagai basis industri nasional hanya akan tercapai apabila hilirisasi tidak sekadar menjadi instrumen stabilisasi pasar CPO, melainkan benar-benar menjadi pengungkit penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan. (RFY)

Menuju Sawit 2045: Jalan Transformasi dari Komoditas ke Bioindustri Strategi



Dua puluh tahun menuju Indonesia Emas 2045, industri kelapa sawit berada pada titik persimpangan strategis. Selama puluhan tahun, sawit menjadi penggerak utama ekspor, sumber devisa, dan penopang ekonomi jutaan masyarakat perdesaan. Namun, dinamika global mulai dari krisis iklim, tuntutan keberlanjutan, hingga kebijakan perdagangan berbasis lingkungan, menuntut sawit untuk melampaui perannya sebagai komoditas primer. Sawit perlu ditransformasikan menjadi bioindustri strategis yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Visi tersebut tidak akan terjadi tanpa roadmap sawit nasional hingga 2045 yang konsisten dan lintas pemerintahan. Pembangunan perlu difokuskan untuk efisiensi rantai pasok dan penguatan hilirisasi berbasis bioekonomi. Target swasembada energi melalui biodiesel tetap relevan, namun harus dilengkapi dengan pengembangan produk turunan bernilai tinggi seperti biosurfaktan, *biochemical*, dan *bioingredient*, agar sawit memiliki fondasi industri yang lebih kokoh dan beragam.

Transformasi industri surfaktan dan kimia global menuju ekonomi rendah karbon mendorong pergeseran dari bahan baku fosil ke sumber alami yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara ekonomi. Dalam konteks ini, sawit bukan sekadar objek perubahan, melainkan bagian dari solusi bagi industri yang tengah mencari alternatif biomassa yang efisien dan tersedia dalam skala besar. Pasar surfaktan global yang bernilai puluhan triliun dolar AS menunjukkan arah pergeseran yang semakin nyata, sementara biosurfaktan yang lebih ramah lingkungan dan kompatibel bagi kesehatan masih menghadapi tantangan biaya produksi. Dengan ketersediaan limbah lemak sawit dalam jumlah signifikan, Indonesia memiliki keunggulan struktural untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, agar peluang ini dapat

dimanfaatkan secara optimal, dukungan pembiayaan hijau yang adil dan adaptif tetap menjadi prasyarat penting.

Fondasi dari penguatan posisi sawit Indonesia dalam rantai nilai global adalah ketersediaan data yang kredibel dan sistem ketertelusuran (*traceability*) yang terintegrasi. Di tengah menguatnya regulasi hijau, data dan *traceability* tidak lagi sekadar alat pengawasan, melainkan prasyarat utama agar produk berbasis sawit dapat diterima sebagai bagian dari rantai pasok industri berkelanjutan, tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha dan posisi petani.

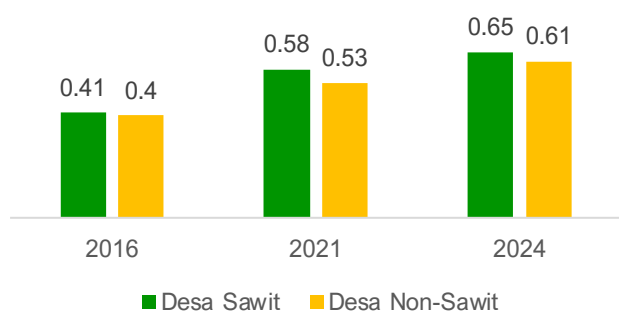
Di luar legitimasi pasar melalui data dan ketertelusuran, penguatan posisi sawit Indonesia juga ditentukan oleh penguasaan teknologi pada rantai nilai hilirnya. Dalam pengembangan biosurfaktan khususnya jenis *glycolipid* dimana komponen lemak menjadi faktor kunci, dan sawit menawarkan pasokan *lipid* yang stabil serta tersedia dalam skala besar. Melalui pengembangan teknologi fermentasi dan pemanfaatan limbah produksi, lemak sawit yang selama ini diperlakukan sebagai residu bernilai rendah dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi mikroba penghasil biosurfaktan. Mengingat mahalnya nutrisi masih menjadi hambatan utama biosurfaktan secara global, keunggulan ini memberi Indonesia peluang nyata untuk membangun fondasi bioindustri biosurfaktan yang kompetitif dan terintegrasi dengan *core business* sawit nasional.

Menuju 2045, masa depan sawit Indonesia akan bertransformasi. Menjadikan sawit bioindustri strategis berarti menempatkannya sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan, keadilan ekonomi, dan kedaulatan nasional. Tanpa langkah visioner hari ini, peluang emas tersebut berisiko terlewat di tengah arus perubahan global yang kian cepat. (FGK)

Kontribusi Ekonomi Sawit: Peran Strategis dalam Perekonomian Nasional

Pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai sumber produksi komoditas strategis nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama dinamika sosial ekonomi terutama di tingkat desa. Keberadaan sawit membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan rumah tangga petani, tenaga kerja, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung, sehingga memengaruhi tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Untuk dapat membandingkan dampak sosial ekonomi pada desa-desa dengan komoditas utama kelapa sawit dan bukan kelapa sawit, maka digunakan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang juga merupakan salah satu indikator Indeks Desa Membangun (IDM). IKE dikonstruksi berdasarkan keragaman produksi masyarakat, akses ke pasar, akses logistik, keterbukaan wilayah, dll. Gambar di bawah menunjukkan bahwa rata-rata IKE desa dengan komoditas utama sawit selalu lebih tinggi daripada desa dengan komoditas utama non-sawit pada tahun 2016, 2021, dan 2024. Hal ini menandakan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit beserta aktivitas terkait mampu menggerakkan kemajuan ekonomi desa. Selain IKE, beberapa studi juga menyebutkan bahwa pendapatan dan pertumbuhan pendapatan petani sawit lebih tinggi daripada petani non-sawit yang mengartikan bahwa dampak sosial ekonomi dari adanya perkebunan sawit bagi sebuah wilayah/desa sangatlah signifikan daripada komoditas lain.



Sumber: BPS (2024) dan PASPI (2022) diolah

Pada 8 provinsi penghasil sawit terbesar juga ditemukan adanya peningkatan rata-rata IKE desa sawit sejak tahun 2016–2024. Secara khusus, Provinsi Riau mencatat kenaikan tertinggi dari 0,48 pada 2016 menjadi 0,76 pada 2024 sekaligus menjadi provinsi dengan rerata IKE desa sawit tertinggi pada 2024. Hal ini juga sejalan dengan posisi Riau sebagai provinsi penghasil CPO terbesar di Indonesia pada



tahun 2024 di mana kontribusi produksinya mencapai 19% dari proporsi produksi nasional.

Tingginya aktivitas ekonomi berbasis sawit menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di desa dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti sektor perdagangan, lembaga keuangan, serta jasa logistik dan pengangkutan. Dengan penguatan produktivitas perkebunan dan perluasan hilirisasi sawit, peningkatan dampak sosial ekonomi di wilayah sentra sawit dapat melanjutkan tren kenaikannya di tahun yang akan datang. Tren peningkatan dan stabilitas nilai IKE menegaskan bahwa industri sawit berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui penguatan kapasitas produksi, keterhubungan pasar, dan dukungan infrastruktur wilayah. Temuan empiris ini memperkuat dasar perlunya kebijakan yang konsisten dalam menjaga keberlangsungan industri sawit, agar kontribusinya bagi pekebun dan masyarakat pedesaan secara luas dapat terus dipertahankan. (FZNA)

Transformasi Konsumsi Minyak Sawit Global: Dari Pangan menuju Energi Terbarukan

Dalam dua dekade terakhir, konsumsi minyak sawit global mengalami perubahan struktural yang fundamental, terutama dari pergeseran proporsi pemanfaatan. Jika pada pertengahan 2000-an minyak sawit masih didominasi sebagai komoditas pangan, maka dalam satu hingga dua dekade berikutnya terjadi *switching* bertahap menuju sektor energi dan industri, mencerminkan perubahan kebutuhan global yang semakin berorientasi pada ketahanan energi.

Pada pertengahan 2000-an, konsumsi minyak sawit global masih relatif terbatas dan terkonsentrasi pada pangan. Sekitar tiga perempat konsumsi sawit dunia pada periode tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan, seiring pertumbuhan populasi dan ekspansi industri makanan di negara berkembang. Pemanfaatan nonpangan, termasuk energi dan oleokimia, masih bersifat marginal dan terbatas pada kebutuhan industri tertentu.

Memasuki pertengahan 2010-an, pola tersebut mulai berubah. Data USDA menunjukkan total konsumsi minyak sawit global meningkat pesat, diiringi oleh kenaikan signifikan pada penggunaan nonpangan. Pada 2015, proporsi konsumsi global untuk pangan sebesar 72% dan nonpangan 28%. Hal ini menandai fase awal pergeseran struktural dari pangan menuju energi dan industri.

Perubahan ini semakin menguat dalam satu dekade terakhir. Pada 2025 struktur konsumsinya berubah signifikan. Porsi konsumsi pangan turun menjadi sekitar 60%, sementara konsumsi nonpangan meningkat menjadi 40% dari total konsumsi minyak sawit global. Proyeksi USDA untuk 2026 menunjukkan porsi pangan diperkirakan turun lebih lanjut menjadi 58% dan nonpangan meningkat menjadi 42%. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan permintaan sawit kini semakin ditopang oleh sektor energi dan industri, bukan lagi pangan semata.

Perubahan pemanfaatan ini terutama didorong oleh ekspansi bioenergi, khususnya biodiesel. Konsumsi CPO untuk biodiesel global meningkat hampir empat kali lipat dari 5,28 juta ton pada 2015 menjadi sekitar 20,08 juta ton pada 2026. Indonesia menjadi aktor utama dalam pergeseran ini, dengan proporsi konsumsi CPO Indonesia menurut USDA pada 2015 untuk biodiesel sebesar 44%, pangan 42%, dan oleokimia 14% dan diproyeksikan pada 2026 bergeser menjadi 57% untuk biodiesel, 30% untuk pangan, dan 13% untuk oleokimia.

Di sisi lain, terjadi diferensiasi regional dalam pola *switching* ini. Uni Eropa, meskipun sempat menjadi pasar biodiesel berbasis sawit yang besar, mulai mengurangi penggunaan CPO pasca-2020 akibat kebijakan RED II dan isu keberlanjutan. Namun, penurunan tersebut tidak menghentikan tren global, karena pertumbuhan konsumsi energi berbasis sawit di Asia dan negara berkembang mampu mengompensasi penurunan di pasar maju. Hal ini menunjukkan bahwa *switching* konsumsi sawit ke energi bersifat global tetapi tidak seragam, dengan pusat permintaan bergeser ke negara produsen dan *emerging economies*.

Selain biodiesel, perkembangan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) memperkuat narasi bahwa dunia semakin membutuhkan minyak nabati untuk energi. Berbagai negara telah menetapkan mandat dan target SAF pada periode 2025–2030, meskipun volume saat ini masih relatif kecil. Secara global, *feedstock* SAF masih didominasi oleh UCO, animal fats, dan residu biomassa. Namun, minyak sawit terutama di negara produsen, tetap memiliki ruang sebagai *feedstock* komplementer, khususnya ketika kebutuhan energi rendah emisi meningkat lebih cepat daripada ketersediaan bahan baku limbah.

Dengan demikian, pergeseran konsumsi minyak sawit global dari dominasi pangan menuju energi dan industri bukan sekadar perubahan sektoral, melainkan transformasi struktural dalam arsitektur ketahanan energi dunia. Minyak sawit kini menempati posisi strategis sebagai *energy carrier* berbasis hayati yang menopang agenda transisi energi, khususnya di negara produsen dan *emerging economies*.

Namun, keberlanjutan transformasi ini hanya dapat dijaga apabila peningkatan produktivitas dilakukan secara sistematis, tata kelola keberlanjutan diperkuat secara kredibel, dan pengembangan *feedstock* berbasis limbah diprioritaskan untuk menekan risiko konflik pangan–energi serta tekanan pasar global. Tanpa fondasi tersebut, *switching* pemanfaatan sawit ke energi berisiko kehilangan legitimasi ekonomi dan politik; sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat, sawit berpotensi menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi rendah karbon dunia dalam jangka panjang. (MA)

Produktivitas atau Stagnasi: Tantangan Riil Produksi Sawit Nasional Pasca El Niño

Di tengah meningkatnya tekanan permintaan global dan domestik terhadap minyak sawit, industri kelapa sawit Indonesia dihadapkan pada paradoks struktural: kebutuhan terus tumbuh, sementara kapasitas produksi bergerak semakin terbatas. Kondisi ini sangat kontras dengan satu dekade lalu, ketika kekhawatiran utama justru berasal dari potensi kelebihan pasokan dan lemahnya harga. Menjelang 2015, tren penurunan harga CPO sejak 2011 bahkan memunculkan kekhawatiran harga akan terus tertekan hingga di bawah USD 600 per ton. Namun, dinamika pasar berubah cepat. Pertumbuhan permintaan—terutama dari biodiesel domestik dan pasar global—telah membalik narasi *oversupply* menjadi tantangan baru berupa keterbatasan suplai.

Saat ini, persoalan utama industri sawit nasional bukan lagi mencari pasar, melainkan memastikan kecukupan produksi yang memenuhi kebutuhan. Berbagai alokasi konsumsi telah menunggu minyak sawit Indonesia, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dalam berbagai lawatan ke luar negeri, Presiden Republik Indonesia kerap dihadapkan pada permintaan negara-negara mitra untuk memperoleh pasokan sawit Indonesia. Realitas ini menegaskan bahwa tuntutan pertumbuhan produksi tidak dapat diabaikan.

Namun, tantangan tersebut tidak semata soal volume produksi, melainkan kualitas fondasi produktivitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi nasional relatif terjaga, tetapi capaian ini semakin rapuh karena tidak disertai peningkatan produktivitas yang memadai. Rata-rata produktivitas sawit Indonesia masih berada di kisaran 3–4 ton CPO per hektare, jauh di bawah potensi genetik tanaman yang diyakini mencapai 9–10 ton CPO per hektare. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama industri sawit sebenarnya berada di tingkat hulu, khususnya praktik budidaya di tingkat kebun.

Fenomena El Niño kerap dijadikan penjelasan atas fluktuasi produksi sawit nasional. Memang, kekeringan dapat menekan pembentukan bunga dan buah dalam periode tertentu. Namun, El Niño bersifat siklikal dan eksternal, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai akar persoalan jangka panjang. Justru, El Niño menjadi pengingat atas pentingnya pengelolaan kebun dengan teknik konservasi tanah dan air

yang handal. Jika tidak, maka fondasi produktivitas sawit nasional akan rapuh. Lemahnya penerapan praktik budidaya yang proper baik di lahan gambut maupun mineral tidak hanya dialami oleh pekebun rakyat, tetapi perkebunan besar juga menghadapi tantangan yang serupa. Sebab, kelapa sawit adalah tanaman yang butuh perawatan yang baik termasuk pemupukan yang tepat guna, sehingga ketika pekebun mengurangi kualitas perawatan maka akan langsung berdampak pada penurunan produktivitas.

Karena itu, persoalan produksi sawit tidak dapat diselesaikan dengan berharap pada kondisi iklim yang bersahabat, karena iklim bisa saja berubah. Fokus kebijakan harus segera diarahkan pada intensifikasi melalui mandatori penggunaan bibit unggul bersertifikat, disiplin peremajaan kebun baik yang dikuasai rakyat maupun perkebunan besar, serta perbaikan pengelolaan agronomi yang mengikuti prinsip *Best Management Practices* (BMP). Jika perlu, peningkatan kapasitas khususnya petani dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan tentang implementasi BMP melalui pelatihan. Selain itu bantuan subsidi pupuk dan sarana produksi lainnya bagi petani perlu diberikan agar terjadi perbaikan kinerja produksi pekebun rakyat yang hingga saat ini memiliki capaian yang paling rendah. Tantangan ini krusial mengingat luas perkebunan rakyat mencapai lebih dari 42 persen luas sawit nasional.

Stagnasi produktivitas membawa implikasi kebijakan serius. Dengan adanya moratorium ekspansi lahan, ruang pertumbuhan produksi semakin sempit dan seluruh beban peningkatan pasokan bertumpu pada intensifikasi. Tanpa peningkatan produktivitas yang nyata, tekanan terhadap ekstensifikasi akan muncul secara alami. Pada titik inilah pilihan kebijakan kembali mengerucut pada dua jalur klasik: intensifikasi atau stagnasi.

Keberhasilan industri sawit Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh keberanian membenahi praktik perkebunan secara fundamental. Tanpa agenda intensifikasi yang konsisten dan terukur, industri sawit akan terus berada dalam siklus kerentanan produksi. Sebaliknya, peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk menjawab tekanan permintaan sekaligus menjaga daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. (SN)

Sawit dan Neraca Perdagangan: Pilar Sunyi Ketahanan Ekonomi Nasional

Kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang memiliki basis permintaan luas, fleksibilitas penggunaan, serta keterkaitan kuat dengan pasar domestik menjadi penopang utama ketahanan ekonomi. Kelapa sawit menempati posisi unik karena tidak hanya terintegrasi dalam perdagangan global, tetapi juga tertanam dalam struktur produksi nasional, konsumsi domestik, dan kebijakan energi. Dengan karakter tersebut, sawit berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah meningkatnya volatilitas perdagangan global.

Dalam pasar minyak nabati global, dinamika permintaan dibentuk oleh hubungan substitusi antarkomoditas—terutama antara minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan kanola—yang sensitif terhadap harga relatif dan kebijakan. Namun, berbeda dengan minyak nabati lain yang dominan pada segmen pangan, minyak sawit memiliki basis permintaan yang lebih terdiversifikasi karena digunakan secara simultan dalam pangan, oleokimia, dan energi. Diversifikasi lintas sektor ini berfungsi sebagai buffer struktural yang meredam fluktuasi permintaan ketika terjadi guncangan pada salah satu segmen konsumsi.

Dalam konteks tersebut, nilai pasar sawit global tetap tumbuh—dengan pertumbuhan sekitar 3,7% dari USD 66,99 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 69,46 miliar pada 2025—memberikan indikasi bahwa permintaan sawit secara agregat tetap terjaga, sejalan dengan struktur konsumsi yang terdiversifikasi lintas sektor.

Stabilitas permintaan global berbasis struktur konsumsi tersebut diterjemahkan ke dalam perekonomian nasional melalui keterhubungan erat rantai nilai sawit dengan sektor produksi dan industri pengolahan domestik, sehingga menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan menopang kontribusinya terhadap PDB. Hal ini tercermin pada perhitungan PDB atas dasar harga berlaku, di mana industri kelapa sawit dari hulu ke hilir menghasilkan nilai tambah sebesar Rp1.433 triliun, setara dengan sekitar 6,47% PDB nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan yang mencapai Rp970 triliun, setara dengan 4,38% PDB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan primer dan menengah (mulai dari CPO, CPKO, produk turunan awal hingga pemanfaatan limbah bernilai ekonomi) menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dengan demikian, hilirisasi sawit berperan sebagai motor penggerak ekonomi

nasional, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan daya saing ekspor berbasis industri.

Sementara itu, kontribusi sawit pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai Rp463 triliun atau 2,09% PDB nasional. Peran ini menegaskan fungsi sawit sebagai penopang utama sektor hulu, penyerap tenaga kerja, serta sumber pendapatan wilayah perdesaan. *Multiplier effect* dari sektor ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik dan stabilitas sosial ekonomi daerah.

Dari sisi eksternal, kelapa sawit merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas devisa dan memperkuat kinerja neraca perdagangan Indonesia. Pada tahun 2024, neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar USD 31,3 miliar, sementara neraca perdagangan CPO, CPKO, dan produk turunannya mencapai USD 35,5 miliar, menunjukkan kontribusi signifikan sektor sawit terhadap surplus perdagangan nasional.

Memasuki tahun 2025, neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi USD 43,8 miliar atau tumbuh sebesar 39,7 persen. Sejalan dengan itu, neraca perdagangan CPO, CPKO, dan produk turunannya juga diperkirakan meningkat menjadi USD 44,4 miliar, atau naik signifikan sebesar 25,2 persen. Peningkatan ini didorong oleh tren harga CPO yang cenderung menguat, pergeseran struktur ekspor ke arah produk hilir bernilai tambah, serta keberlanjutan basis permintaan global yang relatif stabil, terutama dari negara-negara pengimpor utama.

Dengan demikian, kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai komoditas ekspor unggulan, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional. Kontribusinya tercermin dalam perannya menopang pertumbuhan PDB, menjaga stabilitas devisa, meredam dampak guncangan eksternal, memperkuat ketahanan energi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

(AF)